KENDARI EKSPRES SELASA, 11 September 2012

Ada Temuan BPK di RSUD Muna

RAHA, KE - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Muna mengancam akan menggiring Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Wa Ode Aswati ke ranah hukum, atas dugaan penyalahgunaan APBD 2011.

Ancaman tersebut dilontarkan sejumlah anggota dewan saat rapat gabungan komisi tentang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah (LKPJ) pada Unit Kerja RSUD Muna, Senin (10/9).

Dugaan penyalahgunaan APBD terkuak dalam LKPJ RSUD Muna yang dilengkapi dengan hasil pemeriksaan dan temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Pihak RSUD diketahui membelanjakan uang untuk pembelian dua kendaraan operasional merek *Toyota* tiope *New Avanza* tanpa tercantum dalam dokumen APBD 2011. Juga da pengadaan alat-alat kesehatan (alkes) yang dinilai fiktif senilai Rp 223 juta lebih.

Dijabarkan dalam hasil temuan itu, ada ketidaksesuaian realisasi belanja dengan nomenklatur yang tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada RSUD Muna.

Dalam DPA untuk item anggaran pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana pada RSUD Muna, pengadaan mobil ambulance sebanyak 12 unit senilai kurang lebih Rp 2,4 miliar. Realitasnya, mobil ambulance tersebut hanya 10 unit, masing-masing mobil ambulance merek Suzuki tipe APV Arena senilai Rp 1,6 miliar lebih, serta dua unit kendaraan operasional tipe *New Avanza* senilai Rp 366 juta lebih

Sebanyak 10 mobil ambulance tersebut diperuntukan bagi dokter yang bertugas di RSUD Muna. Kenyataannya, yang digunakan dokter baru empat unit, satu unit belum digunakan. Sisanya, dipinjamkan kepada Puskesmas Kabawo, Lawa, Maligano, Tampo dan Tikep.

Sementara, dua unit Avanza dijadikan sebagai kendaraan operasional Direktur RSUD Muna dan Kepala Bagian Keuangan dan Perencanaan RSUD Muna.

BPK juga menemukan realitas tiga mobil ambulance yang digunakan tiga dokter ahli, tidak difungsikan sebagaimana mestinya.

Rapat LKPJ yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Muna, Mahmud berjalan alot. Anggota Komisi I Taufan Besi bersikukuh agar dua dugaan penyalahgunaan anggaran tersebut harus direkomendasikan ke ranah hukum, karena jelas-jelas merugikan keuangan negara.

"Ini sudah jelas merugikan keuangan negara Rp 223 juta lebih untuk belanja alkes tapi tak kelihatan wujudnya, serta pembelian dua unit kendaraan operasional tipe *New Avanza* yang tak tercantum dalam APBD. Yang melakukan kelancangan ini adalah pihak RSUD Muna dalam hal ini Direktur dan Kabid Perencanaan," serang Taufan.

Anggota Komisi III La Ode Koso sepakat dengan Taufan. Kata dia, seluruh data dan fakta-fakta serta pengakuan dari pihak RSUD dan eksekutif sudah nyata-nyata ada indikasi kuat penyalahgunaan APBD.

"Belanja dua unit *New Avanza* ini sudah nyata-nyata tidak ada dalam APBD 2011. Jika tercantum dalam DPA RSUD, itu adalah kesalahan fatal dari eksekutif yang mencantumkan DPA yang tak ada dalam APBD. Ini adalah uang rakyat yang dipakai. Saya hargai semua, tapi tak ada tawar menawar lagi, temuan ini harus direkomendasikan ke ranah hukum," ujarnya.

La Ode Tariala, anggota Komisi III lainnya, menyarankan dewan tidak gegabah dalam mengambil keputusan.

"Kita minta RSUD menyerahkan dulu DPA aslinya, mungkin saja mereka belanja dengan alas hukum DPA yang dibuat eksekutif. Kalau item belanja itu ada dalam DPA, berarti ada lagi